

# TINJAUAN TENTANG PENYITAAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)

 Oleh: DEDY SETYAWAN ( 02400111 )

Law

Dibuat: 2009-03-27 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Penyitaan, SIM dan STNK, Kecelakaan Lalu lintas

## ABSTRAK

Dalam kasus lalu lintas khususnya apabila terjadi kecelakaan lalu lintas antara korban dan pelaku biasanya saling mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling benar. Secara umum biasanya yang diminta oleh korban maupun pelaku adalah Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan disamping surat tanda pengenal lainnya seperti halnya KTP, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa maupun kartu identitas bukti diri lainnya.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang? 2. Hambatan-hambatan dalam hal penyitaan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari Polresta Malang dan data sekunder mencakup dokumen, buku, serta laporan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan pihak kepolisian dan dokumentasi di Polresta Malang sebagai penunjang data primer yang kemudian diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil dan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang adalah sebagai berikut: (a) Adanya pelanggaran terhadap lalu lintas (menerobos lampu merah, ugal-ugalan, dan lain-lain), dengan adanya pelanggaran tersebut polisi melakukan penyitaan terhadap SIM dan STNK sebagai alat bukti dalam peristiwa kecelakaan. Hal ini didasarkan oleh pasal 52 UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya yang mencantumkan hak polisi dalam melakukan penyitaan bagi motor atau STNK berdasarkan kondisi tertentu; (b) Adanya kecelakaan lalu lintas, adanya kecelakaan lalu lintas tersebut biasanya dipicu oleh beberapa faktor, yang antara lain adalah: faktor pengemudi (manusia), lalu lintas, jalan, kendaraan dan lingkungan. (2) Hambatan-hambatan dalam penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang adalah tidak memiliki identitas, tidak jelasnya informasi atau identitas dari korban maupun pelaku dikarenakan yang bersangkutan sakit parah atau tidak dapat diajak berkomunikasi atau bahkan meninggal dunia sehingga sulit dilakukan identifikasi, dengan tidak ditemukannya identitas korban yang menyebabkan pihak polisi merasa kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap kecelakaan tersebut.

Penulis dalam hal ini dapat memberikan saran kepada masyarakat untuk melaksanakan tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan petugas, serta memperhatikan kelengkapan kendaraan. Kepada aparat kepolisian yang secara langsung berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam lalu lintas jalan raya, penulis menyarankan agar pihak kepolisian melaksanakan

ketentuan peraturan perundangan dengan seadil-adilnya, serta mengupayakan langkah preventif yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan adanya berbagai penyuluhan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tata tertib berlalu lintas.

## ABSTRACT

In traffic case, especially when there are traffic accident both parties usually claimed that they were the right side. Generally, what asked by the victim or subject was driving lisencc and letter of vehicle number beside the other identification sign like Identification card, student card, college student card, etc.

The research had statement of problems: (1) what factors cause the confiscation of letter of vehicle number and driving lisencc in traffic accident in Central Police Office of Malang Law region? (2) What kind of inhibition in driving lisencc and letter of vehicle number confiscation?

The research used socio-juridical approach with primary data source which found from Central Pollice Office of Malang and secondary data included documents, books, and reports. Data collection technique was interview with polce office and documentation of Central Police Office as the supporter of primary data which were processed in descriptive qualitative way.

According to the research, the result could be concluded as: (1) Factors caused the confiscation of letter of vehicle number and driving lisencc in traffic accident in Central Police Office of malang law region were: (a) violation to the traffic (through the red traffic sign, driving rough, etc), because of the violation, the police would do confiscation to the driving lisencc and letter of vehicle number as evidence in the accident event. It based on section 52 Rule No.14 / 1992 about Traffic and Highway vehicle which stated the police right in doing confiscation to motor vehicle or letter of vehicle number according certain condition; (b) accident event which caused by several factors, like: driver (human), traffic, highway, vehicle, and environment. (2) Inhibitions in confiscation of letter of vehicle number and driving lisencc in traffic accident at Central Police Office of Malang law regioin were no identity, lack of information or identity of the victim and subject since both of them injured or death which caused trouble in identification, no victim identity which caused the police difficult to do identification in the accident event.

The writer suggest to the people to do traffic use orderly, obedient to the traffic sign and the officer, pay attention to the vehicle completeness. To the police office who has direct relation with law enforcement in traffic, the writer suggest to do the rule in fair way, also trying the preventive way, that was increasing the law awareness by various illumination and workshop aimed to increase the people understanding in law, especially related with traffic rule.